

Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Surat Kabar Pedesaan

Entang SASTRAATMADJA*

Di Indonesia surat kabar pedesaan dikenal dengan istilah koran masuk desa atau KMD. Sebelum adanya program KMD, yaitu dalam beberapa bulan selama Pelita II yang lampau, Departemen Penerangan Republik Indonesia telah mengadakan Penerbitan Khusus Untuk Daerah Pedesaan. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai rintisan pemerintah untuk meratakan informasi ke pedesaan. Sasaran utama dari penerbitan ini adalah: *pertama*, meningkatkan kegemaran membaca masyarakat desa; *kedua*, membantu usaha pemberantasan buta huruf gaya baru yang mencakup buta aksara, buta angka, buta bahasa Indonesia dan buta pendidikan dasar; *ketiga*, mempelajari jalur distribusi yang efektif yang dapat menjangkau daerah pedesaan; dan *keempat*, meningkatkan gairah penerbit dan peran-serta masyarakat desa dalam pembangunan.

Sesuai dengan keterangan pemerintah tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 1979-1980 bahwa mulai Pelita III ini, kegiatan penerbitan khusus untuk daerah pedesaan dihentikan, dan dalam rangka meningkatkan arus informasi ke pedesaan, peranan pers daerah akan diperbesar antara lain melalui kegiatan Pers Masuk Desa. Keterangan pemerintah tersebut secara nyata telah memberikan arah, dan sekaligus menentukan momentum bagi pelaksanaan Pers Masuk Desa atau yang secara populer disebut dengan istilah program Koran Masuk Desa.

Di samping membantu meratakan informasi ke pedesaan, KMD bertujuan untuk memenuhi beberapa jalur pemerataan yaitu, *pertama* pemerataan memperoleh pendidikan, dalam hal ini pendidikan non-formal melalui media pers sebagai sarana pendidikan umum yang murah dan efektif; *kedua*, pemerataan kesempatan kerja, apabila kegiatan tersebut telah berkembang dan pemerlu-

*Ir. Entang Sastraatmadja adalah Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nusantara (Uninus).

Sensus Penduduk 1980 menyebutkan, bahwa penduduk pedesaan yang pernah sakit selama seminggu sebelum pelaksanaan sensus penduduk, berjumlah 6.362,977 orang. Dari jumlah itu, 1.568.754 orang (24,65%) diobati sendiri dan 388.472 orang (6,10%) tidak diobati. Masih adanya penderita sakit yang diobati sendiri dan bahkan tidak diobati itu, kiranya bukan karena faktor kemiskinan semata-mata, tetapi mungkin sekali karena tempat berobat jauh dari tempat tinggalnya, serta karena daya tampung, kemampuan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat kurang memuaskan penduduk pedesaan. Faktor-faktor itu rupanya memperkuat kebiasaan banyak orang pedesaan terhadap sistem pengobatan tradisional. Oleh karena itu, warga masyarakat pedesaan yang belum bersedia memberi penghargaan sepenuhnya terhadap sistem pengobatan modern masih banyak.

PENUTUP

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat pedesaan masih rendah. Tingkat kesehatan masyarakat pedesaan yang masih rendah itu, terutama karena nilai faktor-faktor kesehatannya masih rendah, yaitu tingkat sosial ekonomi, pendidikan, penyediaan makanan yang bergizi, lingkungan hidup dan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat pedesaan, sangat rendah. Hal itu juga diperkuat dengan angka Indeks Mutu Hidup masyarakat pedesaan yang masih rendah, yaitu hanya sebesar 53 pada tahun 1980, dibandingkan dengan Indeks Mutu Hidup masyarakat kota yang telah mencapai 69 pada tahun yang sama.

Indeks Mutu Hidup masyarakat pedesaan yang masih rendah itu, menunjukkan bahwa angka kematian bayi dan anak-anak balita masih tinggi, sedangkan angka harapan hidup dan kemampuan membaca huruf Latin masih rendah. Angka kematian bayi dan anak-anak balita yang masih tinggi itu menunjukkan, bahwa kemampuan sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat pedesaan masih rendah, sehingga kemampuan dalam menyajikan makanan yang bergizi dan perawatan kesehatannya, terutama pada para ibu, bayi dan anak-anak balita, juga rendah. Angka harapan hidup yang rendah, menunjukkan bahwa kemampuan sosial ekonomi, sosial budaya, penyediaan makanan yang bergizi, pembinaan lingkungan hidup dan kesehatannya, masih rendah. Sedangkan angka kemampuan membaca huruf Latin yang rendah, menunjukkan bahwa di samping rendahnya kemampuan sosial ekonomi, jangkauan fasilitas atau sarana pendidikan dan kesempatan kerja dalam masyarakat pedesaan, masih terbatas kemampuannya. Hal itu terlihat, bahwa sebagian besar penduduk pedesaan tidak tamat SD, sehingga tidak mampu memperoleh kesempatan bekerja yang lebih baik dan produktivitas kerjanya pun sangat rendah.

Tabel 4

PERSENTASE RUMAH TANGGA PEMAKAI SUMBER AIR MINUM

Sumber Air Minum	Pedesaan	Kota
1. Leding	2,06	26,44
2. Pompa air	2,11	11,16
3. Sumur (perigi)	58,63	52,72
4. Mata air	21,03	2,72
5. Sungai	12,68	2,10
6. Air hujan	1,52	1,41

Sumber: BPS, Sensus Penduduk 1980, Seri S.2.

Tabel 5

PERSENTASE KEMATIAN PENDUDUK MENURUT PENYEBABNYA

Diagnose Penyebab Kematian	1972	1980
1. Radang akut saluran pernapasan	12,0	19,9
2. Penyakit diare	17,0	18,8
3. Penyakit kardiovaskuler	5,1	9,9
4. TBC	6,0	8,4
5. Tetanus	4,6	6,5
6. Penyakit susunan syaraf	5,1	5,0
7. Tipus perut	2,1	3,3
8. Komplikasi kehamilan dan persalinan	2,2	2,5

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat 1982.

Dari Tabel 5 terlihat, bahwa persentase kematian penduduk karena penyakit radang akut saluran pernapasan paling tinggi dan peningkatannya pun paling besar. Penyakit itu mudah sekali berjangkit dalam suatu daerah yang padat penduduknya serta udaranya kotor, lembab atau sangat kering. Dengan demikian, semakin banyaknya kematian penduduk akibat penyakit itu, mungkin sekali karena ketidakseimbangan lingkungan hidup, misalnya semakin luasnya tanah kritis, kurang atau berlebihannya pepohonan, kekeringan dan banjir yang berkepanjangan. Di samping itu, mungkin juga karena sistem pergantian udara pada rumah-rumah penduduk pedesaan kurang baik, misalnya rumah-rumah yang tidak dilengkapi dengan jendela, rumah-rumah yang dindingnya terbuat dari bilik atau daun-daunan, rumah-rumah yang tidak terkena sinar matahari ataupun karena terlalu dekat dengan kandang hewan dan pembuangan sisa yang tidak dirawat secara baik.

rakat pedesaan pun berbeda-beda. Selama ini, masih sering ditonjolkan bahwa keadaan alam Indonesia kaya-raya. Namun, kekayaan alam tersebut tidak merata dan sebagian besar belum dapat dibudidayakan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat. Lagi pula, alam Indonesia sangat dipengaruhi oleh musim dan cuaca setempat, seperti sering terjadinya bencana banjir, kekeringan, letusan gunung berapi dan serangan hama, sehingga mempersulit kehidupan masyarakat setempat. Beberapa pemberitaan surat kabar mengungkapkan, bahwa sebagian penduduk Kecamatan Padang Tepong Kabupaten Lahat terpaksa memakan gadung akibat musim kering yang berkepanjangan.¹ Sekitar 3.100 orang penduduk Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung kekurangan pangan, karena lahan pertanian di daerah itu kurang sesuai untuk tanaman padi.² Beberapa desa di Kabupaten Cirebon mengalami masa paceklik, karena selama 4 tahun berturut-turut tanaman padinya terserang hama wereng dan hasil tambaknya sulit dipasarkan.³ Sekitar 15.000 orang penduduk Kabupaten Kutai terancam kelaparan, akibat musim kemarau yang sangat panjang.⁴ Demikian juga di daerah Kabupaten Muna dan Lombok Selatan, banyak penduduk pedesaannya yang mengalami kekurangan pangan akibat kekeringan.⁵ Beberapa kasus tersebut merupakan indikasi pula, bahwa masyarakat pedesaan masih berorientasi pada nasib dan belum mampu menguasai alam lingkungannya.

Akibat lain dari kekurangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat pedesaan dalam menguasai alam, ialah banyak penduduk desa yang justru merusak lingkungan hidupnya, misalnya perusakan kawasan hutan. Padahal, kawasan hutan mempunyai arti penting bagi kehidupan masyarakat, yakni sebagai sumber bahan bangunan, bahan bakar serta sumber air bagi usaha pertanian, air minum dan kesehatan lingkungan. Data BPS menyebutkan, bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan kayu bakar untuk memasak masih lebih tinggi daripada mereka yang menggunakan bahan bakar lainnya (lihat Tabel 3). Apabila penggunaan kayu bakar masih semakin besar, maka fungsi hutan sebagai penunjang kehidupan masyarakat pun akan semakin berkurang. Bahkan, jika penebangan kayu tersebut semakin besar dapat mengakibatkan gundulnya hutan-hutan serta bahaya banjir dan kekeringan yang berkepanjangan.

¹ Lihat *Berita Buana*, 7 Pebruari 1983.

² Lihat *Berita Buana*, 26 Maret 1982.

³ Lihat *Berita Buana*, 8 April 1983.

⁴ Lihat *Sinar Harapan*, 12 April 1983.

⁵ Lihat *Sinar Harapan*, 28 Maret 1983; dan *Kompas*, 25 Maret 1983.

didikan masyarakat pedesaan yang rendah itu agaknya mempunyai kaitan positif dengan rendahnya pengetahuan masyarakat pedesaan terhadap kemajuan jaman. Walaupun sifat-sifat tertutup masyarakat pedesaan sudah banyak dibuka oleh berbagai jenis media massa modern, tetapi nilai-nilai primordial dan tradisional yang sudah tidak sesuai dengan tingkat kemajuan sekarang ini masih berkembang, sehingga menghambat kemajuan masyarakat pedesaan sendiri. Beberapa penelitian dan pemberitaan surat-surat kabar sering menyebutkan, bahwa di beberapa desa, para penduduknya masih ada yang terlalu berorientasi pada nasib, ada yang berpandangan banyak anak banyak rejeki, melarang anak-anak masuk sekolah, melarang anak-anak gadis keluar rumah, melarang makan jenis makanan tertentu, menolak Tabanas dan bahkan menolak hal-hal yang berbau asing.

Tingkat sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat yang rendah, mempunyai korelasi positif dengan rendahnya kemampuan masyarakat dalam menyajikan makanan yang bergizi. Dalam Seminar Nasional "Kualitas Manusia dalam Pembangunan" di Palembang tanggal 19-22 Maret 1984, Dr. Ascobat Gani mengungkapkan, bahwa dalam Pelita III diperkirakan terdapat 30% anak balita menderita kekurangan energi dan protein, 16,4 per 1.000 anak balita kekurangan Vitamin A, 70% wanita hamil, 40% anak prasekolah, 70% anak usia 6-14 tahun dan 40% pria pekerja kasar menderita anemia gizi, serta 50% murid-murid SD di daerah Karanganyar menderita kekurangan zat yodium. Beberapa pemberitaan surat-surat kabar mengungkapkan, bahwa 30% anak balita di daerah Jambi, 1 juta anak di DKI Jaya dan sekitar 34% anak balita di daerah Tangerang menderita kekurangan gizi.¹

Para ahli gizi menyatakan, bahwa kekurangan gizi dapat menyebabkan mudah terserang penyakit, bahkan kurang motivasi, apatis dan reaksinya terhadap perubahan sangat lamban sehingga menurunkan prestasi belajar dan bekerja. Sensus Penduduk 1980 menyebutkan, bahwa jumlah penduduk pedesaan yang pernah sakit sebanyak 6.362.977 orang (5,58%), sedangkan penduduk kota yang pernah sakit sebanyak 1.732.107 orang (5,27%). Dari penduduk pedesaan yang pernah sakit, 1.568.754 orang diobati sendiri dan 388.472 orang tidak diobati. Sedangkan dari jumlah penduduk kota yang pernah sakit, 364.458 orang diobati sendiri dan 39.806 orang tidak diobati.² Dilihat dari persentase dan perbedaan persentasi penduduk pedesaan dengan penduduk kota, sangat kecil. Namun, dilihat secara absolut, jumlah penduduk yang pernah sakit yang dicacah hanya selama seminggu sebelum pelaksanaan sensus, merupakan hal yang sangat memprihatinkan.

¹Lihat *Kompas*, 22 Oktober 1983; *Pelita*, 25 Oktober 1983; dan *Warta Berita Antara*, 15 Nopember 1983.

²Lihat BPS, *Sensus Penduduk 1980, Seri S.2.*

nyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. Apalagi dalam suasana perubahan-perubahan yang sangat cepat ini, dituntut ketahanan fisik dan mental masyarakat. Karena ketidakseimbangan antara kecepatan perubahan dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan itu, dapat memperlebar jurang perbedaan kemajuan masyarakat kota dan desa, sehingga tidak mustahil timbulnya keguncangan-keguncangan dalam masyarakat.

KEADAAN KESEHATAN MASYARAKAT DESA

Sebagaimana telah diketahui, bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berada di daerah pedesaan, yang tersebar di 931 pulau dengan keadaan geografinya yang beraneka-ragam. Keadaan geografi yang beraneka-ragam tersebut mempengaruhi keadaan masyarakatnya, sehingga kebudayaan masyarakat desa pun beraneka-ragam, baik mengenai sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, religi, ekonomi, pengetahuan maupun sistem teknologinya.

Oleh karena itu, untuk memenuhi keadaan masyarakat desa diperlukan berbagai pegangan sebagai alat pengukurannya. Sehubungan dengan ini, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri, telah menyusun faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai indikator tingkat kemajuan suatu masyarakat desa. Faktor-faktor tersebut meliputi mata pencaharian, produksi, adat-istiadat dan kepercayaan, kelembagaan dan pemerintahan, tingkat pendidikan, swadaya masyarakat, serta prasarana dan sarana desa. Berdasarkan nilai faktor-faktor tersebut, dilakukan pengelompokan desa-desa ke dalam tiga tingkatan, yaitu desa-desa Swadaya, Swakarya dan Swasembada.¹

Dari faktor-faktor tersebut terlihat bahwa faktor kesehatan belum dimasukkan. Tingkat kesehatan suatu masyarakat memang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat sosial budaya dan sosial ekonomi. Namun, pembangunan tidak akan berjalan lancar jika kesehatan masyarakat terganggu, karena tingkat kesehatan masyarakat yang rendah mempunyai kaitan dengan produktivitas kerja masyarakat yang rendah pula. Untuk memahami tingkat kesehatan masyarakat, termasuk tingkat kesehatan masyarakat desa, WHO telah mengeluarkan suatu pedoman, yang mencakup faktor-faktor kesehatan yang dapat digunakan sebagai indikator kesehatan, yaitu: (1) faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan kesehatan masyarakat, yakni meliputi data demografi, kematian, penyakit dan gizi; (2) faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan lingkungan hidup, yakni meliputi data penyediaan air bersih, perumahan sehat dan pembuangan sisa; (3) faktor-faktor yang berkaitan

¹Lihat Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, *Tipe dan Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa 1977/1978*.

tidak ditangani secara optimal, sebenarnya hal itu menyalahkan kemungkinan yang bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Sudah jelas penyelamatan tanah air Indonesia dengan program penghijauan mendesak untuk segera dikembangkan dan dibudayakan, karena pertaruhan-nya adalah makin gerakan penghijauan tak berhasil disebarluaskan makin akan kalah berpacu dengan kemerosotan lingkungan alam. Dan ini memper- taruhkan hari depan yang lebih suram bagi masyarakat kita maupun generasi- generasi mendatang. Oleh karena itu perlu diusahakan agar jangan sampai ada lagi tanah-tanah yang dibiarkan gundul tak bertanaman, seperti yang selama ini masih banyak terlihat di tanah pekarangan penduduk, di tanah pe- matang sawah ladangnya, atau tanah di pinggiran jalan. Justru penghijauan di tanah pekarangan rumah bermanfaat besar untuk menanamkan cinta ke- lestarian alam kepada anak-anak sebagai generasi penerus. Adapun per- tanahan yang kosong dari tanaman di samping tidak produktif tetapi lebih- lebih mudah rusak karena gerogotan air hujan maupun pemanasan terik matahari.

Sedapat mungkin pertanahan yang miring diusahakan berteras-teras agar aliran air hujan sangat diperlambat dan dimungkinkan sebanyak-banyaknya meresap ke dalam tanah. Akhirnya, dalam rangka program penghijauan se- sesuai dengan kondisi dan tuntutan pertanahan masing-masing sewajarnya terus-menerus dipikirkan jenis tanaman unggul yang paling cocok untuk ke- lestarian alam dan paling menguntungkan masyarakat.

Sudah tentu masyarakat kita selayaknya bergiat mensukseskan program penghijauan ini sebagai sarana yang cukup mudah untuk memperindah ke- hidupan negara, yaitu menyuburkan tanah airnya, melestarikan flora serta faunanya, dan meningkatkan kualitas hidup warganya.

dengan aren dapat menjadi alternatif yang lebih baik untuk menghasilkan gula di tanah air ini sebagai pengganti perkebunan tebu.¹

Namun merupakan faktor yang sangat menunjang keberhasilan penghijauan ialah tanaman aren tidak menuntut pertanahan subur atau perawatan banyak, mudah tumbuh, dan cepat besar. Biasanya aren merupakan tanaman terlantar dibandingkan dengan tanaman lainnya, meskipun demikian tetap tumbuh baik dengan daun rimbun dan akar serabut amat banyak sehingga amat cocok untuk melindungi tanah. Selain itu tanaman aren bisa hidup dengan baik di daratan sampai ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut (dalam bahasa Jawa tanaman aren disebut kelapa pegunungan, seperti terungkap dalam istilah "njanur gunung"). Dilihat dari bentuk pohonnya yang cukup artistik, sudah barang tentu tanaman aren baik pula untuk penghijauan pinggiran jalan-jalan raya.

Program penghijauan perlu digalakkan mulai dari tanah pekarangan penduduk di mana tanah ini merupakan lingkungan alam terdekat mereka. Dari sinilah perlu tercermin kemauan dan kesungguhan rasa cinta mereka terhadap kelestarian lingkungan alam. Dalam upaya menghijaukan tanah pekarangan sebenarnya dapat dibina semangat cinta mereka untuk melestarikan lingkungan alam yang lebih luas di tanah air. Jelaslah akan aneh mengharapkan masyarakat berpartisipasi mensukseskan program penghijauan nasional, sedangkan atas penghijauan tanah pekarangannya sendiri mereka acuh tak acuh. Sebab itu sewajarnya pembinaan rasa cinta kelestarian alam memang memulai (dan jangan melalaikan) pembinaan untuk menghijaukan tanah pekarangannya sendiri.

Penghijauan tanah pekarangan ini sedapat mungkin dilakukan dengan variasi tanaman besar sampai yang kecil. Adapun tanaman besar menahan hujaman air hujan deras sedangkan tanaman kecil di bawahnya melindungi lahan yang ditutupinya dari jatuhnya air hujan tanaman di atasnya, sehingga kesemuanya ini mencegah deraan hujan yang akan mengikis lapisan tanah subur. Namun dalam hal ini tetap berlaku prinsip: perlu memilih jenis tanaman yang memberikan pendapatan maksimal di samping mampu menjamin keselamatan lahan. Sebagai tanaman penghijauan pekarangan ada kemungkinan memilih jenis tanaman buah-buahan yang pada umumnya merupakan tanaman besar atau sedang, tanaman sayuran yang pada umumnya merupakan tanaman kecil, dan tanaman perhiasan atau kosmetika yang pada umumnya merupakan tanaman sedang atau kecil seperti anggrek, mawar, lidah buaya.

¹A. Rahman Rangkti, "Memperbaiki Kelestarian Alam dan Mengurangi Kemiskinan di Pedesaan Jawa dengan Lamtoroisasi dan Arenisasi" dalam majalah *Analisa*, Pebruari 1980, hal. 115-116.

Supaya pelaksanaannya mencapai hasil maksimal, proyek penghijauan terpadu dengan pengembangan peternakan perlu diorganisasikan oleh aparat pemerintah atau koperasi yang sudah kuat. Hal irfi tidak dapat ditangani penduduk secara sendiri-sendiri saja. Umpamanya dalam hal pengadaan bibit, modal pemasaran hasil-hasilnya, dan keserentakan partisipasi organisasi yang buruk. Secara konkrit apabila hanya beberapa orang menernakkan ulat sutera atau sapi perah dalam rangka proyek penghijauan, tentu terdapat kesukaran untuk memasarkan hasil-hasilnya. Jikalau hasil-hasilnya tidak laku, maka hal ini akan melemahkan atau mematahkan semangat petani dalam melaksanakan pelestarian lingkungan alam.

Adapun tanaman penghijauan yang bisa cepat diperoleh manfaatnya ialah jenis lamtoro gung, gamal, dan rumput gajah. Sedangkan jenis ternak yang dapat segera memberikan penghasilan ialah sapi perah, kelinci dan babi. Ternak ini pun banyak menghasilkan pupuk kandang untuk menyuburkan tanah tandus. Pengembangan sapi perah di Indonesia penting sekali, karena sampai sekarang sekitar 83% kebutuhan susu sapi tergantung dari impor.¹ Diketahui bahwa pada tahun 1976 Indonesia baru memproduksi susu sapi 57.000 ton, padahal Srilangka 147.000 ton, Birma 359.000 ton, Israel 659.000 ton, Bangladesh 800.000 ton, Venezuela 1.193.000 ton, Mexico 3.960.000 ton, New Zealand 6.538.000 ton, India 8.400.000 ton, Belanda 10.538.000 ton, Perancis 29.890.000 ton, dan Amerika Serikat 54.592.000 ton.²

Proyek penghijauan sangat baik pula dilakukan dengan perkebunan tanaman murbai yang sekaligus diarahkan untuk pengembangan peternakan ulat sutera. Penanaman murbai ini tidak sulit, karena tidak membutuhkan persyaratan khusus dan murbai mudah tumbuh asalkan lahan tidak terlampaui kurus. Sedangkan pemeliharaan ulat sutera sendiri mudah diajarkan kepada penduduk pada umumnya, dan usaha ini bisa dimanfaatkan sebagai mata pencaharian pokok atau sebagai usaha sambilan. Peternakan ulat sutera amat cocok dikembangkan di Pulau Jawa yang padat penduduknya. Dari hasil sutera alam ini akan terpenuhi sebagian dari kebutuhan sandang masyarakat yang ternyata kebanyakan bahan bakunya masih harus diimpor dari negara lain. Jika sutera alam ini berhasil diproduksi secara meluas, tidak mustahil nantinya dapat dijadikan barang ekspor baik sebagai bahan mentah atau sebagai barang jadi.

Di samping diperoleh benang sutera untuk dijadikan kain tenun atau kain batik, dari ulat sutera juga dihasilkan pupuk kandang dan kepompong ulatnya merupakan makanan bergizi untuk ternak unggas atau perikanan. Di Sulawesi

¹Berita *Antara*, 24 Februari 1983.

²Biro Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 1977-1978*, Jakarta, 31 Desember 1979.

kotak korek api, 6 gram telur kurang lebih seperdelapan butir telur, dan 6 gram susu kurang lebih tigaperempat sendok makan.¹ Dibandingkan dengan negara lain yang potensinya lebih kecil ternyata peternakan Indonesia sangat jauh ketinggalan. Hal ini dapat diamati dari populasi ternak baik di negara agraris maupun negara industri seperti yang dikemukakan oleh BPS yaitu keadaan tahun 1979 untuk Indonesia dan untuk negara lain keadaan tahun 1976.²

Perihal peternakan sapi (bukan sapi perah) di Indonesia hanya terdapat sekitar 6,5 juta ekor, yaitu di Pulau Jawa sebanyak 3,9 juta sedangkan di luar Jawa 2,6 juta. Sebagai bahan perbandingan dapat dikemukakan bahwa di negara lain populasi ternak adalah sebagai berikut: Madagaskar menernakkan 9,8 juta ekor, Turki 13,9 juta ekor, Ethiopia 25,9 juta ekor, Mexico 28,7 juta ekor, Argentina 58,1 juta ekor, Brasilia 95 juta ekor, sedangkan di negara industri: Perancis menernakkan 24,2 juta ekor, Australia 33,4 juta ekor, dan Amerika Serikat 127,9 juta ekor. Sudah tentu di daerah luar Jawa yang luas itu dapat ditenakkan sapi dalam jumlah besar-besaran demi peningkatan kualitas hidup.

Sementara itu di daerah Luar Jawa yang merupakan pertanian basah diprioritaskan untuk pengembangan jenis ternak kerbau. Keadaan populasi ternak kerbau ini ternyata lebih memprihatinkan daripada ternak sapi. Di Indonesia hanya ditenakkan sekitar 2,4 juta ekor, yaitu di Pulau Jawa sebanyak 1,1 juta dan di luar Jawa 1,3 juta. Padahal di negara lain seperti di Pilipina ditenakkan 5,1 juta ekor, di Thailand 5,8 juta ekor, di Cina 30 juta ekor, dan di India 60,8 juta ekor. Patut diketahui bahwa di negara Mesir, Pakistan, dan India ternak kerbau juga dimanfaatkan produksi susunya, sehingga 60-70% produksi susu negeri ini dihasilkan dari kerbau.

Sangat tepat apabila jenis ternak-ternak besar itu dikembangkan di daerah pertanian luar Jawa di mana tanah garapan memang luas sedangkan tenaga kerja pada umumnya kurang, sehingga ternak ini bisa dimanfaatkan tenaganya untuk pengangkutan dan penggarap tanah. Selain itu dapat diusahakan juga pemeliharaan domba atau kambing jenis unggul, di mana yang pertama diprioritaskan untuk pertanian basah sedangkan yang kedua untuk pertanian kering. Dari semua jenis ternak tadi akan dihasilkan pula kulit hewan yang merupakan bahan baku industri kulit atau kerajinan tangan.

Tanaman perkebunan untuk penghijauan pada umumnya merupakan jenis tanaman tahunan, yaitu baru memberikan penghasilan setelah tumbuh ber-

¹Mamur Suriaatmadja, *Pemenuhan Kebutuhan Protein Hewani Ternak untuk Menunjang Landasan Pembangunan Masyarakat Adil dan Makmur*, Bandung, Desember 1982.

²Biro Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 1982*, Jakarta, Februari 1983.

Kerusakan alam tanah air kita yang semakin meluas itu disebabkan oleh kebutuhan penduduk pedesaan, terutama yang miskin, guna mencari pendapatan untuk hidupnya atas dasar ketidaktahuan mereka akan fungsi hutan dan tumbuh-tumbuhan dalam ekosistem alam. Sebab itu demi keberhasilan program melancarkan gerakan penghijauan nasional, tentulah proyek-proyek penghijauan di samping menanamkan kesadaran lingkungan seharusnya dapat pula menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Karena bagaimanapun selama masyarakat pedesaan tetap miskin dan tidak mendapatkan pengertian tentang pelestarian lingkungan alam yang meningkatkan pendapatan, mereka akan meneruskan tradisi menggunduli pertanahan seperti selama ini.

KEBIJAKAN PENGHIJAUAN DIPADUKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI

Adapun gerakan penghijauan yang sekaligus dapat mengikis kemiskinan bangsa Indonesia adalah gerakan penghijauan yang dipadukan dengan program transmigrasi. Daerah-daerah aliran sungai di Pulau Jawa menjadi rusak berlarut-larut adalah karena sudah terlampau padatnya penduduk yang keadaan sosial ekonominya masih terbelakang. Untuk memperbaiki daerah aliran sungai yang rusak itu dengan kegiatan penghijauan dapat diperkirakan perlu pemindahan penduduk sampai 9 juta kepala keluarga atau sekitar 40 juta jiwa. Sudah pasti hal ini memang cocok disatupadukan dengan program transmigrasi yang sekaligus bisa ditujukan untuk memperbaiki pertanahan gundul di daerah-daerah luar Jawa dengan proyek-proyek penghijauan.

Lahan-lahan rusak yang sangat luas di luar Jawa seperti padang alang-alang dan semak belukar dapat dihijaukan kembali dalam rangka pelaksanaan transmigrasi. Di samping itu program transmigrasi tidak usah menyebabkan semakin berkurangnya hutan-hutan primer, yang mengkonversikan bermacam-macam kekayaan flora dan fauna asli yang tak ternilai harganya dan belum diketahui manfaatnya, dengan penebangan terus-menerus.

Petani kecil dan buruh tani yang karena kemiskinannya memerosotkan pertanahan di Pulau Jawa mudah diberi tanah garapan di luar Jawa dengan dibina untuk menghijaukannya, sekaligus mereka diarahkan meneladankan cara bertani kepada penduduk yang masih bertani dengan cara berpindah-pindah dan menggunduli hutan. Apabila diperhitungkan pertanahan yang harus dihijaukan di luar Jawa dan Nusa Tenggara adalah seluas 36 juta hektar. Dan kalau untuk satu kepala keluarga petani dijatah 3,6 hektar (terdiri dari 2 hektar bagi transmigran persawahan irigasi dan 5 hektar bagi transmigran tanah perkebunan), maka sebenarnya bisa tertampung 10 juta kepala keluarga atau 40-50 juta orang transmigran.

KERUSAKAN ALAM DI TANAH AIR

Studi Departemen Pekerjaan Umum Institut Pertanian Bogor dan Universitas Gajah Mada, mengungkapkan bahwa pada tahun 1938 tingkat erosi di Pulau Jawa baru mencapai 1 milimeter setahun. Tetapi dalam tahun 1978, atau 40 tahun kemudian, tingkat erosi ini sudah semakin parah yaitu menjadi 3,65 milimeter setahun. Hal ini berarti bahwa kenaikan erosi setiap tahunnya adalah sebesar 0,066 milimeter. Jikalau kenaikan tetap sebesar ini, maka pada tahun 2000 nanti tingkat erosi di Pulau Jawa akan menjadi 5,10 milimeter dalam setahunnya.¹

Untuk menggambarkan kerusakan erosi ini secara konkrit, Sanusi Wiradinata dari IPB menghitung bahwa tingkat erosi sebesar 3,65 milimeter itu sama dengan penghanyutan tanah subur seluas 96.495 hektar dengan kedalaman 0,5 meter atau seluas 2.412.375 hektar dengan kedalaman 2 centimeter. Adapun luas Pulau Jawa dan Madura adalah 13.218.700 hektar. Apabila tanah garapan menghasilkan beras 3 - 6 ton dan setahun panen dua kali, maka tingkat erosi 3,65 milimeter setahun itu berarti hilangnya produksi beras sebesar 578.970 - 1.157.940 ton.

Kerusakan lingkungan alam yang berlarut-larut di Pulau Jawa ini adalah akibat masyarakatnya belum sadar lingkungan, dalam keadaan miskin, dan kondisi kependudukan yang teramat padat, sehingga melampaui daya dukung lingkungan alamnya. Para petani memang terlalu kekurangan tanah garapan, sehingga mendorongnya membabat hutan di gunung-gunung untuk dijadikan perladangan. Selain itu sebagian terbesar penduduknya hanya mampu menggunakan kayu untuk bahan bakar dan bahan perumahan. Demi memenuhi kebutuhan inilah, penduduknya pada umumnya menebangi kayu-kayuan di sekeliling mereka untuk keperluan sendiri atau dijual sebagai sumber penghasilan tambahan sebagai akibat pendapatan yang tidak mencukupi.

Begitu pula studi Departemen Pekerjaan Umum IPB dan UGM mengamati keadaan kerusakan lingkungan alam di daerah luar Jawa. Apabila dalam tahun 1938 boleh dikatakan tidak ada pengikisan erosi di daerah luar Jawa, maka pada tahun 1978 tingkat erosi sudah mencapai 0,25 milimeter setahun. Ini berarti kenaikan 0,01 milimeter setiap tahunnya. Dengan kenaikan erosi tetap sebesar ini, maka pada tahun 2000 nanti diperkirakan tingkat erosi mencapai 0,47 milimeter setahun.²

¹Prof. Dr. Emil Salim, "Dari Kuantitas ke Kualitas dalam Pembangunan Kehutanan" dalam harian *Suara Karya*, 14 Mei 1979.

²*Ibidem.*

lingkungan dapat menghasilkan berbagai manfaat dan ini mencakup pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan produksi pangan bergizi, penyediaan kayu bakar dan bahan perumahan. Program penghijauan dapat pula dipadukan dengan kegiatan transmigrasi dalam rangka pembangunan bangsa.

Berbagai masalah dan manfaat tersebut perlu disoroti dalam mengkaji program penghijauan nasional. Selama ini dipandang sebagai sebab mendasar dari kerusakan lingkungan alam adalah faktor kemiskinan dan ketidaktahuan penduduk. Oleh karena itu untuk menggerakkan partisipasi penduduk dalam program penghijauan nasional, tulisan ini mencoba menekankan penyadaran akan pembangunan atau perbaikan lingkungan alam di pedesaan yang sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dengan ini diharapkan proyek-proyek penghijauan dapat mengembangkan kualitas hidup di pedesaan, yaitu membina ekosistem yang harmonis, menjamin kecukupan bahan pangan bermutu dan pemukiman yang sehat, serta meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat desa.

PEMBINAAN KESADARAN LINGKUNGAN ALAM

Bangsa Indonesia tentu mudah mengerti betapa kerusakan lingkungan alam di Pulau Jawa sudah mencapai keadaan yang parah. Ini ditandai oleh berlangsungnya banjir-banjir pada setiap musim penghujan hampir di seluruh daerah aliran sungai-sungainya, yang di berbagai tempat menjadi malapetaka banjir besar. Sebaliknya, di musim kemarau debit air di sungai-sungai itu sangatlah merosot, sehingga akibatnya cukup luas areal persawahan kekurangan air irigasi. Dalam hal ini beberapa tokoh negara kita sampai mengatakan, bahwa bila proses kerusakan alam yang berlarut-larut itu tidak segera diatasi maka akhirnya Pulau Jawa akan menjadi padang tandus.

Sementara itu kerusakan lingkungan alam diberitakan juga telah kian meningkat di daerah-daerah luar Jawa. Pada saat sekarang banyak daerah, seperti Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan sudah mencapai keadaan yang rawan. Sebab itu tidaklah mengherankan jika di daerah-daerah ini sering kali terjadi bencana banjir, bahkan sampai membobolkan jembatan-jembatan atau memutuskan jalan-jalan perhubungan.

Maka dari itu seharusnya segenap penduduk Indonesia terutama di pedesaan menyadari bahwa pemanfaatan hutan atau pepohonan yang sewenang-wenang dengan memabatinya sampai pertanahan menjadi gundul akan menyebabkan kerusakan alam negeri kita, khususnya memerosotkan daya guna tanah dan air. Kesadaran akan lingkungan alam demikian wajar

PENUTUP

Mengingat pemuda desa merupakan sumber tenaga kerja yang potensial, maka pembinaan dan pengembangan ketrampilan bagi mereka perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Tentu pemegang tanggung jawab utama dalam proses pelaksanaannya adalah pemerintah. Oleh karena itu pemerintah perlu segera mengeluarkan satu peraturan yang baru sebagai pengganti Keppres No. 23 tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda untuk disesuaikan dengan komposisi baru Kabinet Pembangunan IV serta untuk lebih menyalurkan koordinasi kerjanya.

Di samping itu organisasi kekuatan sosial politik dalam usaha mendidik dan membina para kader-kader organisasinya perlu juga ikut mengambil bagian dalam usaha membina dan mengembangkan ketrampilan yang dibutuhkan oleh para kader ini. Organisasi-organisasi kepemudaan perlu menyusun suatu rencana dan program-program kerja yang jelas dalam proses pembinaan dan pengembangan ketrampilan bagi pemuda di desa PKK dan LKMD yang sudah ada di desa perlu lebih banyak melaksanakan pembinaan dan pengembangan bagi para pemuda desa.

Instansi pemerintah seperti Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Dalam Negeri yang telah mempunyai proyek-proyek pembinaan dan pengembangan bagi pemuda desa perlu lebih meningkatkan koordinasi kerjanya sehingga hasil kerjanya benar-benar dirasakan oleh para pemuda di desa. Balai Latihan Ketrampilan milik Departemen Tenaga Kerja, Balai Latihan Ketrampilan Industri milik Departemen Perindustrian atau Kelompok Belajar Usaha Tingkat Perintis milik Departemen Dalam Negeri perlu lebih disebarakan ke seluruh wilayah tanah air sehingga mampu mengikutsertakan semua pemuda terutama bagi pemuda di desa. Kepada lembaga/badan swasta yang berkeinginan dan memiliki program kerja yang jelas untuk mengadakan pembinaan dan pengembangan ketrampilan bagi pemuda di desa perlu didorong dan diberikan kesempatan untuk melaksanakannya.

tegis akan menunjang peningkatan kesejahteraan hidup dan sekaligus mendorong kemampuan, kemauan, dan swadaya mereka untuk terus tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu materi pembinaan dan pengembangan ketrampilan bagi pemuda di desa antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Jenis ketrampilan yang perlu dikembangkan bagi pemuda yang bekerja sebagai petani adalah teknologi pra- dan post-panen yang meliputi pengelolaan tanah, pengairan, pembibitan, penggunaan insektisida, pemupukan, pemeliharaan tanaman, panen, pengelolaan hasil panen, penyimpanan, pengemasan, pengangkutan, dan pemasaran.
2. Jenis ketrampilan bagi pemuda yang bekerja sebagai peternak adalah pemilihan bibit unggul, makanan ternak, pemeliharaan, pengobatan, pemanfaatan kotoran hewan, pengelolaan dan penyimpanan daging, susu, dan pemasarannya.
3. Jenis ketrampilan yang dibutuhkan oleh pemuda nelayan adalah pengetahuan yang berkaitan dengan pemakaian alat-alat penangkapan ikan seperti perahu motor, pancing, pukat, cuaca dan arus/angin, pengelolaan, penyimpanan, dan pemasaran ikan. Untuk ikan air tawar jenis ketrampilan yang dibutuhkan adalah teknik pembuatan dan pengelolaan kolam, makanan ikan, bibit ikan, penangkapan, penyimpanan, dan pemasarannya. Dalam kasus ini juga termasuk udang, belut dan lain sebagainya.
4. Jenis ketrampilan yang dibutuhkan oleh pemuda yang bekerja sebagai tukang batu adalah cara membuat batu bata, batako, campuran bahan, dan teknik sederhana membangun rumah. Bagi pemuda tukang kayu perlu diberikan pengetahuan tentang jenis-jenis kayu, cara memotong, menggergaji, mengukur serta menghaluskan kayu dan teknik membuat mebel sederhana. Di sektor perbengkelan ketrampilan yang dibutuhkan adalah cara reparasi sepeda, sepeda motor, mobil, menambal ban, memperbaiki radio, televisi, kulkas, pompa air, tata cara mengelas, mematri dan sebagainya.
5. Kegiatan kerajinan rumah tangga/industri rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh kaum wanita. Ketrampilan yang dibutuhkan adalah menjahit, menenun, menyulam, membuat karangan bunga, tata rias dan memasak. Selain itu ketrampilan tentang mengelola beberapa jenis buah-buahan tertentu menjadi minuman ringan, membuat roti, kue-kue dari bahan baku yang ada di lingkungannya sendiri. Ketrampilan ini dapat menjadi bagian dari program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Semua materi untuk masing-masing kelompok itu perlu disusun dalam satu sistem paket. Sistem dalam arti satu perangkat kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain dan disusun secara teratur guna mencapai suatu tujuan tertentu. Apabila anggaran memungkinkan perangkat kegiatan itu disusun dalam bentuk buku. Buku-buku itu akan menjadi pedoman bagi tenaga

MATERI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Penyusunan silabus pembinaan dan pengembangan ketrampilan bagi para pemuda di desa perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu: (1) asas yang harus dipegang dalam proses pembinaan dan pengembangan ketrampilan adalah dari pemuda, oleh pemuda dan untuk pemuda; (2) materi pembinaan dan pengembangan perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat desa yang bersangkutan; (3) prinsip bahwa pengalaman merupakan guru yang terbaik bagi pemuda di desa dan oleh karena itu materinya harus bersumber pada apa yang mereka lakukan setiap harinya.

Tujuan dari usaha pembinaan dan pengembangan ketrampilan bagi pemuda di desa adalah meningkatkan taraf hidupnya melalui peningkatan kemahiran kerja dan penguasaan jenis ketrampilan serta meningkatkan disiplin kerja, menumbuhkan kreativitas kerja, dan membangkitkan kepercayaan kepada diri sendiri. Mengingat bahwa disiplin kerja, kreativitas kerja, dan rasa percaya diri merupakan hal yang terus berkembang sesuai dengan meningkatnya penguasaan ketrampilan, maka materi yang seharusnya ada dalam silabus itu adalah jenis-jenis ketrampilan yang sesuai dengan situasi kehidupan masyarakat dan kondisi geografis desa yang bersangkutan.

Ini berarti bahwa jenis ketrampilan bagi pemuda di daerah pesisir berbeda dengan desa yang terletak di daerah pedalaman dan/atau desa-desa yang terletak di pinggir-pinggir jalan raya. Selain itu desa-desa yang terletak di daerah pegunungan tentu akan berbeda dengan desa yang terletak di lembah sungai. Keadaan geografis desa dan kebutuhan lapangan kerja ini perlu diamati secara teliti dan sungguh-sungguh sehingga jenis ketrampilan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nyata mereka serta mampu memecahkan masalah lapangan kerja yang dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Selain itu hal yang perlu diperhatikan juga adalah kondisi dan situasi kehidupan mereka sehari-hari; kondisi lingkungan hidup dan mata pencahariannya, kondisi sosial ekonomi, kondisi penguasaan ketrampilan dan tingkat pendidikan formal yang pernah ditempuhnya. Secara umum pemuda di desa adalah drop out pendidikan tingkat sekolah dasar dengan tingkat penguasaan ketrampilan yang rendah. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Dari ilustrasi ini juga terlihat bahwa masih ada pemuda (15-30 tahun) yang belum mengenyam pendidikan sekolah dasar dan jumlah mereka yang drop-out sekolah dasar lebih besar daripada yang menamatkan sekolah dasar. Ini berarti bahwa tingkat ketrampilan mereka juga rendah dan untuk itulah perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan ketrampilan bagi mereka.

Materi pembinaan dan pengembangan ini perlu disesuaikan dengan tingkat pengetahuan mereka, tingkat serta macam kebutuhan nyata yang secara stra-

janya. Hal ini sesuai dengan orientasi baru organisasi kepemudaan yang terbentuk berdasarkan pada kesamaan fungsi, profesi, dan minat. Dengan dasar orientasi ini para pemuda kita diarahkan kepada usaha mengisi pembangunan nasional ini melalui usaha pengembangan fungsi, profesi dan minatnya. Maksudnya, pemuda sebagai sumber potensial tenaga kerja harus mampu bekerja sesuai dengan fungsi, profesi, dan minatnya dan terus berikhtiar untuk meningkatkan kemampuannya sesuai dengan fungsi, profesi dan minat. Dari aspek ini pembinaan dan pengembangan itu perlu dilakukan sehingga para pemuda kita akan menjadi tenaga kerja yang trampil, kreatif, dan inovatif terutama bagi para pemuda yang berdomisili di desa.

Organisasi pemuda yang struktur organisasinya telah mencapai tingkat desa seperti KNPI, AMPI, Karang Taruna, dan Pramuka atau lain-lainnya lagi perlu mengintegrasikan program kerjanya termasuk program pembinaan dan pengembangan ketrampilan bagi pemuda desa ke dalam program kerja dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Sehingga dengan demikian Kepala Desa yang juga menjabat Ketua LKMD sekaligus menjadi kepala proyek pembinaan dan pengembangan ketrampilan bagi pemuda desa. Fungsi-fungsi ataupun aktivis organisasi pemuda yang juga duduk sebagai anggota musyawarah dalam LKMD harus mampu menyusun rencana kerja, program kerja yang terperinci, dan biaya pelaksanaan program-program itu. Tentu para fungsionaris ataupun aktivis organisasi pemuda di desa ini terlebih dahulu telah menerima bimbingan dan pengarahan dari pengurus organisasi itu di tingkat yang lebih tinggi.

Mekanisme kerja organisasi pemuda seperti ini menuntut kepada para pengurus organisasi pemuda dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten untuk benar-benar memahami tata cara penyusunan rencana kerja, menuangkannya ke dalam program kerja dan menghitung biayanya. Selain itu para pengurus organisasi pemuda ini harus mengetahui tata cara mengelola suatu proyek. Sedangkan bagi para pemuda di desa yang fungsinya melaksanakan tugas-tugas teknis lapangan perlu diberikan ketrampilan-ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja yang ada di desanya. Tata cara seperti ini dapat dilaksanakan apabila para pemimpin organisasi pemuda benar-benar berorientasi dan memiliki wawasan tentang daerah pedesaan.

Ketiga, pendidikan non-formal berupa kursus-kursus ketrampilan bagi para pemuda di desa rupanya sudah saatnya diadakan dan dikembangkan. Balai Latihan Ketrampilan milik Departemen Tenaga Kerja perlu dikembangkan sehingga meliputi semua desa di seluruh pelosok tanah air. Departemen-departemen lain seperti Pertanian, Perindustrian, dapat menyiapkan tenaga-tenaga trampilnya sebagai fasilitator dalam kursus-kursus ini. Apabila kursus-kursus ini dapat dilaksanakan secara serentak dan berkesinambungan oleh

Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)¹ sebagai lembaga masyarakat di tingkat desa atau kelurahan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya masyarakat. Salah satu tugas pokoknya seperti yang tercantum pada pasal 6 point f adalah membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan. Badan ini berada di bawah pembinaan aparat Departemen Dalam Negeri, yaitu Direktur Jenderal Pembangunan Desa. Badan ini seharusnya telah mengadakan inventarisasi permasalahan yang dihadapi oleh para pemuda kita di desa, dan bahan itu perlu dibagikan kepada instansi pemerintah yang memiliki program pembinaan dan pengembangan pemuda di desa. Dalam melakukan tugas ini perlu dijalin kerjasama dengan Departemen P dan K dan Menteri Negara Urusan Pemuda dan Olah Raga serta Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.

Secara umum kita dapat mengatakan bahwa masalah yang dimiliki oleh pemuda di desa adalah kurangnya lapangan dan kesempatan kerja, kurangnya ketrampilan dan tingkat pendidikan formal yang rendah, adanya penggunaan tenaga kerja di bawah umur dan masalah kekurangan gizi. Kenyataan ini akan menimbulkan sikap-sikap yang terlihat seperti motivasi yang rendah terhadap pembangunan dan perubahan; rasa rendah diri dan tidak mampu; cepat patah semangat dan tidak mau meneruskan pekerjaannya lagi; dan rasa tidak berdaya untuk menghadapi masalah dan mengatasi tekanan situasi sekitarnya.² Masalah ini perlu dipecahkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Karena kita beranggapan bahwa manusia merupakan subyek yang berdaya cipta yang memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis, berinteraksi dan mengubah dunia sekitarnya.

Proses menginventarisasi masalah ini perlu dilakukan secara sungguh-sungguh dan intensif sehingga kita dapat mengetahui secara tepat jenis dan kombinasi ketrampilan yang dibutuhkan di daerah pedesaan, perbedaannya dengan jenis ketrampilan yang dibutuhkan di lingkungan perkotaan dan bagaimana perkiraan perkembangan lapangan kerja dan jenis ketrampilan yang diperlukan di daerah pedesaan terutama ketrampilan di luar sektor pertanian.

¹Lihat *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28, Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa*.

²Em. Haryadi, A. Totok Hartono, *Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Swadaya* (Jakarta, Pusat Pendidikan dan Latihan Bina Swadaya, 1983) hal. 9.

mendapat pekerjaan di daerah itu sesuai dengan jenis ketrampilan yang telah dikuasainya¹ atau mampu mengembangkan usaha sendiri.

Pembina utama ketrampilan bagi pemuda terutama pemuda di desa adalah pemerintah seperti yang termaktub dalam Keppres No. 23, tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda. Badan ini diketuai oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan anggota-anggota: Menteri Dalam Negeri (merangkap Wakil Ketua), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri Penerangan, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Muda Urusan Pemuda (juga merangkap sebagai Ketua Satuan Pengendali Koordinasi), Menteri Muda Urusan Peranan Wanita, dan Menteri Muda Urusan Koperasi. Badan ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Struktur organisasinya sampai dengan tingkat kecamatan. Camat berfungsi sebagai Kepala Satuan Pelaksana Kecamatan dalam hal pengendalian operasional pembinaan dan pengembangan generasi muda tingkat kecamatan. Badan ini disusun sesuai dengan susunan dan struktur Kabinet Pembangunan III, dan rupanya badan ini tidak berfungsi dalam usahanya membina dan mengembangkan ketrampilan pemuda di desa. Mungkin hal ini disebabkan oleh kecilnya dana yang dialokasikan untuk kepentingan itu seperti antara lain terlihat pada alokasi dana di Departemen P dan K tahun anggaran 1982/1983 untuk sektor program pembinaan generasi muda hanya sebesar Rp 8.425.000,00. Di samping itu masalah koordinasi antar departemen juga tidak berjalan. Oleh karena itu *sudah saatnya Keppres ini dicabut* dan dibuatkan yang baru sesuai dengan struktur dan susunan Kabinet Pembangunan IV. Masalah ini perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.

Dewasa ini Departemen Tenaga Kerja telah mulai dengan program pembinaan dan pengembangan ketrampilan melalui Balai Latihan Ketrampilan (BLK) dan Latihan Ketrampilan Keliling (LKK) di beberapa ibukota propinsi dan kabupaten. Rupanya balai-balai latihan ini perlu dikembangkan sampai tingkat kecamatan dan desa-desa. Di samping itu beberapa departemen lain seperti Departemen Industri, Pertanian, dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah mempunyai tenaga-tenaga Penyuluh Lapangan sampai dengan tingkat desa. Apabila di antara departemen dan lembaga-lembaga itu dapat melakukan koordinasi kerja yang baik dan terprogram mereka dapat melakukan tugas-tugas pembinaan dan pengembangan ketrampilan pemuda desa. Di samping itu Departemen Sosial dapat juga melakukan pembinaan dan pengembangan ketrampilan pemuda desa melalui Karang Taruna, dan Departemen Dalam Negeri melalui PKK atau LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa). Sedangkan Departemen P dan K dapat melalui program-program pendidikan luar sekolah dan kepramukaan.

¹Philip H. Combs and Manzoor Ahmed: *Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Non-Formal* (Jakarta, CV Rajawali, 1984) hal. 398.